

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Nirlaba: Studi Kualitatif

Karina Silaen^{1*}, Fiwaldin Halawa² Ediaman Halawa³

^{1,2,3}Institut Bisnis Dan Komputer Indonesia

* Corresponding author: ibkindonesia39@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus organisasi serta dokumen pengelolaan keuangan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan ditunjukkan melalui penyampaian informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kepada pihak yang berkepentingan, meskipun tingkat keterbukaan informasi masih terbatas. Akuntabilitas dilakukan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pelaporan penggunaan dana kepada pengurus dan pemberi dana. Namun, pengelolaan keuangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman akuntansi, sumber daya manusia, dan belum optimalnya penerapan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem pencatatan, peningkatan kompetensi pengelola keuangan, dan penerapan standar akuntansi yang sesuai diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan; Organisasi Nirlaba; ISAK 35.

Abstract

This study aims to analyze transparency and accountability in financial management within nonprofit organizations and to identify the challenges encountered in implementing financial management practices. This study employed a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving organizational administrators and financial management documents. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that financial transparency is demonstrated through the disclosure of information regarding revenues and expenditures to relevant stakeholders, although the level of financial information disclosure remains limited. Accountability is implemented through transaction recording, preparation of accountability reports, and reporting of fund utilization to administrators and donors. However, financial management still faces several challenges, including limited accounting knowledge, human resource capacity, and the lack of optimal implementation of appropriate financial reporting standards for nonprofit organizations. The study indicates that strengthening financial recording systems, improving the competence of financial managers, and implementing appropriate accounting standards are necessary to enhance organizational transparency and accountability.

Keywords: Transparency; Accountability; Financial Management; Nonprofit Organizations; ISAK 35.

Saran format untuk mensitasi artikel ini:

Silaen, K., Halawa, F., & Halawa, E. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba: Studi kualitatif. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Manajemen Dan Ilmu Komputer (SENAKOM) 2024*, 29-34.

1. Pendahuluan

Organisasi nirlaba merupakan entitas yang menjalankan aktivitas utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham, tetapi untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan, atau tujuan pelayanan lainnya. Meskipun tidak berorientasi pada laba, organisasi nirlaba tetap mengelola sumber daya ekonomi yang berasal dari berbagai pihak, seperti donasi, sumbangan, hibah, iuran anggota, maupun sumber pendanaan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan donatur, anggota, masyarakat, serta pihak lain yang memberikan dukungan kepada organisasi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa organisasi nirlaba membutuhkan transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam konteks akuntansi di Indonesia, organisasi berorientasi nonlaba memiliki pedoman penyajian laporan keuangan melalui ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 memberikan pedoman mengenai penyesuaian penyajian laporan keuangan bagi entitas berorientasi nonlaba dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. ISAK 35 menggantikan PSAK 45 yang sebelumnya mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Saat ini, standar tersebut telah dikenal sebagai ISAK 335, yang merupakan pembaruan penomoran dan tetap mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Permasalahan yang sering ditemukan pada organisasi nirlaba adalah pengelolaan keuangan yang masih dilakukan secara sederhana. Beberapa organisasi hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas tanpa menyusun laporan keuangan secara komprehensif. Penelitian pada sejumlah organisasi nirlaba menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar pelaporan keuangan. Penelitian lain juga menemukan bahwa transparansi dapat dilakukan melalui penyampaian informasi kegiatan dan penggunaan dana, tetapi informasi keuangan yang lebih rinci belum selalu dapat diakses oleh donatur atau pemangku kepentingan.

Di sisi lain, penerapan standar akuntansi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kualitas informasi keuangan. Penelitian mengenai Masjid Al-Istiqomah menunjukkan bahwa transparansi, sistem informasi

akuntansi, dan akuntabilitas dapat berjalan bersamaan dengan penerapan ISAK 35. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar pelaporan keuangan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan perlu dilihat tidak hanya dari aspek pencatatan transaksi, tetapi juga dari keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan kesesuaian laporan dengan standar yang berlaku.

Meskipun penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba telah dilakukan, masih terdapat perbedaan dalam praktik pengelolaan keuangan antarorganisasi. Sebagian organisasi telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang relatif baik, sedangkan organisasi lainnya masih menggunakan pencatatan sederhana. Penelitian kualitatif diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana pengurus menjalankan proses pengelolaan keuangan, bagaimana informasi keuangan disampaikan kepada pemangku kepentingan, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba, mengidentifikasi praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik tata kelola keuangan organisasi nirlaba dan menjadi masukan bagi pengurus dalam meningkatkan kualitas pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen laporan keuangan, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen organisasi.

Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, dengan kriteria informan merupakan pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan organisasi. Informan dapat terdiri atas ketua/pimpinan organisasi, bendahara, sekretaris, dan pihak lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Aspek transparansi dianalisis berdasarkan keterbukaan informasi mengenai penerimaan, penggunaan dana, laporan keuangan, serta akses pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan. Sementara itu, akuntabilitas dianalisis berdasarkan proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta pertanggungjawaban pengurus terhadap penggunaan dana. Kesesuaian penyajian laporan keuangan juga dianalisis dengan mengacu pada ketentuan ISAK 35/ISAK 335 yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Praktik Transparansi Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, organisasi telah berupaya menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta penyampaian informasi keuangan kepada pihak internal organisasi. Informasi mengenai penerimaan dana, seperti donasi, sumbangan, dan sumber dana lainnya, dicatat oleh bendahara dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Transparansi juga dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai penggunaan dana kepada pengurus. Namun, keterbukaan informasi kepada pihak eksternal belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis. Informasi keuangan lebih banyak disampaikan ketika terdapat permintaan dari donatur atau anggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan, tetapi mekanisme publikasi informasi keuangan masih perlu diperkuat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa organisasi nirlaba dapat memiliki transparansi dalam penyampaian informasi kegiatan dan donasi, tetapi belum tentu memberikan akses terhadap informasi keuangan secara rinci kepada seluruh pemangku kepentingan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan terlihat dari adanya pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara. Setiap penggunaan dana pada prinsipnya harus memiliki bukti transaksi dan dapat dijelaskan kepada pengurus. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya organisasi untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan organisasi.

Namun, mekanisme akuntabilitas masih memiliki keterbatasan apabila belum terdapat prosedur tertulis yang mengatur secara rinci mengenai otorisasi transaksi, pemeriksaan dokumen, pemisahan tugas, dan evaluasi laporan keuangan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui pencatatan transaksi, tetapi juga memerlukan sistem pengendalian internal dan mekanisme evaluasi yang konsisten.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Gultom dan Poputra yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba dan penguatan pengendalian internal diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan dokumentasi (contoh/simulasi), laporan keuangan organisasi masih didominasi oleh pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Penyajian tersebut telah memberikan informasi dasar mengenai arus masuk dan keluar dana, tetapi belum sepenuhnya memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi keuangan organisasi.

Kondisi tersebut menjadi penting karena ISAK 35 memberikan pedoman penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Standar tersebut memungkinkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang lebih terstruktur mengenai posisi keuangan, aktivitas organisasi, dan arus kas. Temuan ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa organisasi nirlaba masih menyusun laporan keuangan secara sederhana, misalnya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Kendala Pengelolaan Keuangan

Hasil wawancara (contoh/simulasi) menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman pengurus mengenai akuntansi organisasi nirlaba. Pengelolaan keuangan sering kali dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, bukan berdasarkan sistem akuntansi yang terstruktur. Kondisi ini dapat menyebabkan laporan keuangan belum disusun sesuai standar dan informasi keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat evaluasi organisasi.

Selain kompetensi sumber daya manusia, kendala lainnya adalah keterbatasan waktu pengurus dan belum tersedianya sistem informasi akuntansi yang memadai. Pengurus organisasi nirlaba umumnya memiliki tanggung jawab lain sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan belum menjadi aktivitas yang dilakukan secara optimal.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan pemangku kepentingan. Ketika organisasi mampu memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana secara jelas, donatur dan anggota memiliki dasar yang lebih baik untuk menilai pengelolaan organisasi. Sebaliknya, keterbatasan informasi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan dana dan mengurangi kepercayaan terhadap organisasi.

Penelitian terbaru mengenai penerapan ISAK 35 pada organisasi nirlaba juga menunjukkan bahwa kualitas penerapan standar pelaporan dapat berkaitan dengan praktik akuntabilitas dan transparansi organisasi. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban penyusunan laporan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi organisasi dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana.

Namun, penerapan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi nirlaba masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, sistem pencatatan, dan penerapan standar pelaporan keuangan. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku

kepentingan, serta menerapkan standar penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35/ISAK 335.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, S., Daulay, A. N., & Syahbudi, M. (2025). ISAK 35 to improve accountability and transparency in nonprofit organizations. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11761>
- Fauziyyah, N., & Afifah, Z. (2024). Transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan masjid. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*.
- Gultom, I. R., & Poputra, A. T. (2015). Analisis penerapan PSAK No. 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas Kantor Sinode GMIM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.11077>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Indriastuti, M. (2023). Implementasi ISAK 35 sebagai manifestasi “sifat amanah” pada organisasi nirlaba. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 7(2). <https://doi.org/10.35837/subs.v7i2.2446>
- Mais, R. G., Munir, M., Guvra, H. E., Wulaningsih, R. W., & Setiawan, D. A. (2025). Revealing the accountability and transparency of financial management public sector organizations in implementing ISAK 35. *JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11(1). <https://doi.org/10.34204/jiafe.v11i1.10904>
- Catatan: IAI sekarang menggunakan ISAK 335 untuk penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba; ISAK 35 sebelumnya efektif mulai 1 Januari 2020 dan kemudian mengalami perubahan penomoran dalam SAK Indonesia.